

POLITIK SOSIO-NASIONALISME SUKARNO DAN KEBANGSAAN PROGRESIF

Oleh
Airlangga Pribadi Kusman
Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstrak

Pemikiran tentang kebangsaan Indonesia adalah ibarat Mutiara dari rangkaian solid dari ajaran politik Sukarno yang apabila dipadatkan terangkum dalam gagasannya tentang Pancasila. Dalam konsepsi teoritik ajaran Sukarno perihal Marhaenisme maka konsepsi kebangsaan Sukarno yang terhubung dengan internasionalisme menjiwai landasan filosofis dari Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab beserta Sila Persatuan Indonesia dalam dasar negara Pancasila. Artikel ini akan menguraikan tentang konsepsi-konsepsi teoritik dari faham kebangsaan dari Sukarno dan mengulas kekuatan dari gagasan itu sebagai artikulasi dari faham kebangsaan progresif di Indonesia.

Kata kunci: Nasionalisme, Soekarno, Pancasila, Politik.

Abstract

Thought about Indonesian nationality is like pearl from series of Soekarno's political teaching, in which this teaching could be concluded in the ideas of Pancasila. In the political conception of Soekarno on Marhaenisme, conception of Soekarno on nationalism is related with internationalism based on philosophical values that inserted in Humanity, civized, and a just. It also related with the perception of Indonesian unity based on Pancasila. This article will discuss on the conception of teoritical framework of Soekarno dan the ideas of nationalism in Indonesia according Soekarno thought.

Keywords: nationalism, Soekarno, Pancasila, Politics.

PENDAHULUAN

Pada zaman ini dunia sedang mengalami guncangan hebat dan panggung politiknya terancam porak poranda akibat berbagai macam artikulasi yang membelah, membenturkan serta mengabarkan kesangsian terhadap legitimasi tatanan politik demokrasi. Bahkan berbagai artikulasi politik ini telah berhasil membawa efek pada pelemahan dan pembalikan capaian-capaian demokrasi. Sebuah sistem politik yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai akhir dari evolusi politik umat manusia yang akan berjalan langgeng. Ditengah kebangkitan antagonisme politik yang menyodorkan perselisihan kultural maupun polarisasi sosial, maka gagasan kebangsaan sebagai jawaban terhadap persoalan keindonesiaan saat ini maupun tawaran problem politik dunia dianggap sebagai sesuatu yang anakronistik atau menyalahi zaman. Setidaknya demikianlah apabila faham nasionalisme atau kebangsaan diasosiasikan sejalan dengan narasi antagonistik pembelah bersamaan dengan politik identitas dan politik populisme.

Berhadapan dengan berbagai macam kesangsian diatas, maka membahas gagasan sosio-nasionalisme yang dipilih dalam tulisan ini sebagai pusat dari gagasan politik Ir Sukarno. --melalui pemahaman atas sosio-nasionalisme Sukarno. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap faham nasionalisme yang tidak saja berbeda bahkan bertolak belakang dengan faham-faham reaksioner lainnya. Tidak hanya itu, tujuan dari tulisan ini melalui pemahaman atas konsepsi sosio-nasionalisme Sukarno, berusaha menjelaskan bahwa dalam konteks saat ini berbagai macam kebangkitan artikulasi politik sayap kanan dalam istilah politik populisme, politik identitas dan politik nasionalisme kanan terjadi karena meredupnya kebangsaan di berbagai negeri, dimana antitesa terhadapnya adalah dengan mengusung politik nasionalisme dalam pemahaman yang progresif. Bagian selanjutnya, sebelum kita bergumul dengan kritik terhadap faham nasionalisme, formasi gagasan sosio-nasionalisme Sukarno dan bagaimana faham sosio-nasionalisme Sukarno menjawab berbagai kritik terhadap nasionalisme baik pada era pergerakan nasional sampai era kontemporer.

PEMBAHASAN

Posisi Sukarno dalam Evolusi Pergerakan Nasional

Pemikiran Sukarno menempati posisi menarik dalam pergerakan nasional Indonesia. Ia merupakan bagian dari lapisan aktivis pemikir pergerakan Indonesia yang berhasil menggeser fokus koordinat pergerakan kebangsaan dari restorasi maupun reformasi menuju arah yang lebih radikal yaitu politik revolusioner. Sebagai bagian dari lapisan aktivisme politik Indonesia yang memperluas konsentrasi perlawanan politik dari gerakan rakyat Indonesia, tidak hanya mendorong perlawanan terhadap penjajahan oleh negeri Belanda namun lebih dari itu menuju pada perlawanan terhadap struktur sosial kapitalisme-imperialisme. Dengan demikian peran Sukarno dalam perjalanan sejarah politik kebangsaan menggeser corak pemikiran dalam aktivisme pergerakan nasional dari cara pandang idealisme (dimana alam pikir menuntun perubahan) menuju pada penempatan kontradiksi pada ranah material sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan teori perlawanan anti-imperialisme.

Apabila ditinjau dari tahap-tahap evolusi kesadaran politik pergerakan rakyat Indonesia, pada awal pergerakan nasional berlangsung seiring dengan integrasi Nusantara dalam pusaran sistem dunia kapitalisme-imperialisme pada awal abad ke-20. Pada saat itu kesadaran kebangsaan tumbuh dalam kehendak mencerdaskan dan memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia dalam artikulasi baik reformis maupun restorasi.

Kesadaran nasional yang tumbuh pada periode awal pergerakan ini banyak menggunakan bahasa keilmuan biologi dan kedokteran, dimana keterbelakangan dan kemiskinan rakyat Indonesia ibarat tubuh yang sakit dan perlu direhabilitasi dengan cara

pandang modern, cara berpikir rasional.¹ Namun demikian pada sisi lain, meskipun kesadaran nasional tentang nasib kaum rakyat bumiputera telah mulai didefinisikan secara berbeda dengan pihak penguasa Belanda, jawaban terhadap problema sosial yang dialami belum menuju pada kontradiksi dan antagonism politik antara penjajah dan terjajah. Suara-suara reformasi politik yang terbaca misalnya dari tulisan dr Abdul Rivai dan Sosrokartono lebih menekankan pada perhatian negara kolonial untuk memberikan ruang pendidikan dan kebijakan yang lebih perduli dengan nasib rakyat terjajah dalam ikatan persemakmuran sejalan dengan doktrin politik etis.²

Sementara lapisan awal gerakan kebangsaan lebih menekankan pada penemuan kembali budaya adiluhung yang hilang (restorasi) dan mengusung pendidikan kultural berbasis budi pekerti untuk mengembalikan kejayaan peradaban masa lalu Jawa. orientasi perjuangan bercorak restorative ini tampil seiring dengan kemunculan Boedi Oetomo yang lahir pada tahun 1908 melalui kepeloporan dr Wahidin Sudirohusodo dan dipimpin oleh dr Soetomo.

Dalam perjalanan selanjutnya kesadaran nasional mulai tumbuh subur di bumi pergerakan kaum bumiputera, seiring perjumpaan antara faham kebangsaan dan Islam dalam rumah besar pergerakan organisasi Sarekat Islam. Terutama ketika Sarekat Islam dibawah pimpinan HOS Tjokroaminoto pada tahun 1918 berhasil menghimpun anggota sekitar dua juta jiwa gerakan kebangsaan menemukan momen populismenya. Disebut sebagai momen populisme bukan hanya karena pada saat itu formasi kebangsaan dalam ekspresi keislaman berhasil menjangkau dukungan massa yang begitu besar, namun juga pada saat itu identifikasi tentang pemaknaan rakyat sebagai perjumpaan lintas kelas telah mulai terbangun. Seiring dengan perumusan tentang bagian dari rakyat Indonesia yang hendak dibela, imajinasi tentang negara yang diperjuangkan pada masa depan telah mulai dirumuskan. Selain itu definisi tentang perumusan kepentingan yang berbeda antara kaum rakyat Indonesia dalam spektrum horizon kebangsaan Islam dengan kaum sana yaitu kepentingan negeri penjajah telah terdefiniskan.

Sukarno mulai muncul dalam arus besar pergerakan Indonesia ketika kesadaran kebangsaan tengah memasuki momen populis dalam horizon keislaman pada fase puncak di Sarekat Islam. Pada saf ini juga muncul ekspresi kesadaran kebangsaan baru seiring perumusan format kebangsaan inklusif yang melibatkan rumusan kebangsaan Indonesia yang lebih terbuka. Kesadaran kebangsaan yang diusung oleh para pemimpin aktivis pergerakan radikal yakni Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat dan dr Tjipto Mangoenkoesoemo melalui Indische Partij pada tahun 1912-1913. Sumbangan dari Indische Partij selain mengartikulasikan konsepsi kebangsaan yang terbuka dimana bukan saja kalangan bumiputera tapi juga seluruh kalangan yang mengakui sebagai bagian dari Indonesia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Indische Partij juga memberi sumbangan artikulasi politik radikal dan lugas dengan mulai berani melakukan gugatan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti dalam artikel sindiran dari Soewardi Soerjaningrat yang berjudul *Als ik Eens Nederlander was* mulai tumbuh.

Pergerakan kebangsaan Indonesia selanjutnya mencapai pada momen radikalitasnya, seiring dengan terjadinya pembelahan dalam tubuh Sarekat Islam. Momen ini terjadi ketika sayap radikal Sarekat Islam terutama yang tumbuh diwilayah Jawa Tengah yakni seperti cabang Solo dan Semarang dibawah pimpinan Semaoen yang didampingi oleh Alimin, Darsono dan Tan Malaka mulai membangun hubungan intens dengan aktivis Sosial-Demokrat Marxist Belanda seperti A Baars dan Sneevlit. Gesekan tersebut selanjutnya memuncak pada tahun 1923, setelah didahului kebijakan disiplin organisasi yang diambil oleh sayap konservati

¹ Hans Pols, Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia, Kompas, 2019, Jakarta, hal.95-96.

² Harry A Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, KPG 2014, Jakarta. Hal 31-67.

dari Sarekat Islam Tjokroaminoto yakni Agus Salim dan Abdoel Moeis pada tahun 1921 bahwa anggota SI tidak boleh mengikuti organisasi politik lainnya. Sementara itu sayap radikal dari SI dibawah Semaoen mulai mengembangkan ISDV. Setelah tahun tahun 1923 seiring dengan keretakan dalam tubuh Sarekat Islam, kaum radikal yang berpisah dari Sarekat Islam membentuk Partai Komunis Hindia yang pada tahun 1924 menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia.

Pada fase ketiga yakni fase radikal, metode pergerakan rakyat melawan imperialisme mulai tersentuh oleh metode materialisme historis, dimana seiring dengan berbagai bentuk perlawanan frontal seperti pemogokan buruh dan propaganda media massa seperti munculnya Harian Sinar Djawa, perumusan kesadaran nasional terhubung dengan kondisi konkret perlawanan kelas pekerja atau kaum proletar berhadapan dengan stelsel kapitalisme-imperialisme. Kemunculan PKI dalam kancah pergerakan yang berbasis pada kekuatan buruh industri selain dibangun melalui kekuatan massa buruh SI yang bergeser ke perjuangan kiri juga dimungkinkan mengingat pada fase mulai kehadirannya pada periode 1917-1926 relatif absennya pergerakan nasional kebangsaan yang dipimpin oleh kalangan intelligentsia sekular radikal yang mengambil peran dalam corak pergerakan non-kooperasi.³

Sukarno menjadi saksi dari periode transisi dalam evolusi pergerakan nasional dan meratapi kehancuran dari dua kekuatan besar pergerakan nasional Indonesia yakni Sarekat Islam maupun Partai Komunis Indonesia. Momen penting dari kehadiran Sukarno dalam kancah pergerakan nasional terjadi saat dirinya menjadi pelanjut momen pergerakan periode saf radikal ditengah kemunculan kembali era represi kolonial serta kehancuran maupun demoralisasi pergerakan nasional. Momentum tampilnya Sukarno juga menjadi fase selanjutnya pergerakan kebangsaan yaitu fase persatuan nasional.

Berangkat dari corak historis dari masyarakat Indonesia yang dihantam gelombang kekuasaan kapitalisme-imperialisme, Sukarno membangun sebuah tesis bahwa hanya melalui persatuan nasional bersendikan atas perjuangan kolektif dari kelas-kelas sosial kecil dan rentan yang perkembangannya dikerdilkan oleh stelsel imperialism Belanda, maka perjuangan anti-imperialisme menuju kemerdekaan nasional dapat dilalui. Segenap semesta analisis sosial tersebut direngkuh melalui konsepsi Marhaen, dan melalui tuntunan ideologi marhaenisme yang berpijak pada dua azas sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi kesadaran subyektif dari kelas-kelas sosial yang menjadi korban pemelaratn struktural dapat diperkuat dan diradikalisasi waktu demi waktu. Pada bagian selanjutnya kita akan mengurai perihal gagasan nasionalisme yang berangkat dari konsepsi sosio-nasionalisme ini menjawab kritik-kritik tajam terhadap oponent dari gagasan kebangsaan.

Sosio-Nasionalisme Sukarno

Pada bagian ini kita akan menguraikan gagasan kritis Sukarno tentang faham kebangsaan yang dikenal dengan istilah sosio-nasionalisme. Uraian dalam tulisan ini mengambil posisi faham sosio-nasionalisme Sukarno. Gagasan sosio-nasionalisme Sukarno adalah antitesa dari nasionalisme reaktif. Perjuangan nasionalisme diletakkan pada pemajuan gagasan emansipasi sosial, kolektivisme progresif dan relasi interaktif dengan pandangan internasionalisme maupun kemanusiaan.

Pada dasarnya, corak progresif dari pandangan sosio-nasionalisme Sukarno berkontestasi dengan konsepsi kebangsaan lainnya yang cenderung konservatif, dimana wajah seperti apa yang tampil mengedepan ditentukan oleh konteks sosial dan posisi politik masing-

³ Fritjof Tichelman, *The Social Evolution of Indonesia: The Asiatic Mode of Production and Its Legacy*, Martinus Nijhoff Publisher, 1980. USA and Netherlands Hal. 178-179

masing pihak dalam pertarungan sosial yang bekerja dalam susunan masyarakat yang menyenjata. Hal ini berlaku juga di berbagai negeri-negeri lainnya.⁴

Untuk mengawali uraian tentang konsepsi sosio-nasionalisme dari Sukarno tulisan ini berangkat dari seperangkat konsepsi tentang nasionalisme yang diuraikan Sukarno ketika menjelaskan Sila Kebangsaan dalam Pidato Lahirnya Pantja-Sila pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut Sukarno setidaknya berpijak pada empat konsepsi pokok yang saling kait mengait untuk menjelaskan posisinya dalam mengajukan Sila Kebangsaan. Pertama, beliau mengambil dari gagasan Ernest Renan filsuf Prancis abad ke-19 bahwa bangsa dapat didefinisikan sebagai kehendak dari sekelompok orang untuk berkehendak bersatu menjadi satu bangsa. Kedua, yang lebih utama lagi beliau mengambil konsepsi dari tokoh pemimpin kekuatan politik kelas pekerja Sosial-Demokrasi asal Austria bernama Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu kesatuan umat manusia yang terikat bersama dalam kesamaan riwayat menuju kesatuan karakter. Ketiga, untuk melengkapi dua konsepsi diatas, Sukarno menambahkan bahwa bangsa secara obyektif dapat difahami sebagai persatuan antara rakyat dan tanah air yang tinggal dan hidup di satu teritorial tertentu yang koheren. Keempat, jauh melampaui cara pandang nasionalisme eksklusif, Sukarno berjumpa dengan pandangan Mahatma Gandhi yang menegaskan nasionalismenya adalah kemanusiaan atau *My Nationalism is Humanity*. Bahwa cita-cita kebangsaan yang diproyeksikan oleh Sukarno dalam perjuangan politiknya berjalan seiring dengan komitmen pada nilai-nilai utama kemanusiaan.

Kebangsaan yang Berpijak pada Susunan Masyarakat

Ajaran Sukarno mengenai sosio-nasionalisme dari perjumpaan pemikiran Bung Karno dengan tokoh sosial-demokrasi asal Austria Otto Bauer. Dalam kutipan atas tesis nasionalisme Bauer diatas terkait bahwa bangsa adalah totalitas manusia yang dipertemukan dalam ikatan persamaan nasib menuju persatuan karakter. Dalam uraian tentang persamaan nasib atau riwayat menuju persamaan karakter, Sukarno memberikan penjelasan awal terkait tesis tersebut, seperti diuraikan pada karya Sukarno pada tahun 1932 di Fikiran Rakjat berjudul *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*, dia menegaskan bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme yang berjejak dalam kehidupan masyarakat. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang tidak tumbuh dan hanya berangkat dari perasaan dan sentiment, namun berangkat dari kondisi faktual yang tumbuh di masyarakat. Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang ngelamun, nasionalisme melangit maupun nasionalisme mistik, tapi adalah nasionalisme yang berjejak dalam hukum-hukum susunan masyarakat.

Untuk mengurai perihal sosio-nasionalisme Sukarno ini kita dapat melacaknya dari argumen, bahwa maksud dari persamaan riwayat menuju kesatuan karakter berarti nasionalisme Indonesia tidak tumbuh dari perasaan dan sentiment, kalau bukan demikian lalu apa yang menjadi akar dari nasionalisme Indonesia. Persamaan riwayat maupun takdir maksudnya adalah kesatuan ikatan pengalaman sejarah yang menyatukan rakyat Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Seperti secara panjang lebar telah kita ulas dalam bab mengenai Politik Marhaen dan anti-imperialisme, Sukarno pada tulisannya *Swadeshi dan Massa-Aksi* menjelaskan bahwa tiap-tiap bangsa memiliki cara berjuangya sendiri sebagai hasil dari pengalaman sejarah masing-masing bangsa menghadapi berbagai macam tantangan sosial dan ekonomi-politik. Pada berbagai negeri jajahan misalnya, pengalaman India dibawah penjajahan Inggris berbeda dengan pengalaman Indonesia dibawah jajahan Belanda meskipun dalam tingkatan yang lebih makro mereka disatukan dalam pengalaman sesama negeri terjajah. Yang menentukan corak kebangsaan suatu negeri adalah respon kolektif dari masing-masing

⁴ Baca Peter N Stearns, *Debating Nationalism: The Evolution of Revolutionary Ideas* (London, Bloomsbury, 2020). Hal. 13.

negeri terhadap tantangan struktural yang mereka hadapi, dalam konteks Indonesia dan India adalah pengalaman spesifik dan respon mereka terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Dalam riwayat pengalaman kolektif yang membentuk ikatan kebangsaan inilah, maka terbentuk karakter bangsa. Karakter bangsa dalam perspektif pemikiran Sukarno bukanlah dalam pengertian karakter yang dibentuk oleh pertemuan perasaan dan sentimen, namun tumbuh dari analisis material yang terbangun dalam dialektika sejarah antara thesis imperialisme dan anti-thesis anti-imperialisme dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

Antithesis reaksi perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap imperialisme Belanda menurut Sukarno harus mengambil pilihan politik revolusioner dan non-kooperasi. Dalam corak perlawanan tersebut maka persatuan nasional yang didalamnya adalah terbangunnya front aliansi lintas kelas yang menyatukan berbagai kekuatan kecil-kecil tadi dalam panji politik marhaenisme adalah suatu pilihan obyektif dan rasional menghadapi imperialisme Belanda maupun situasi neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim) paska kemerdekaan Indonesia.⁵ Namun demikian formulasi strategi yang berpijak pada pemahaman atas susunan masyarakat Indonesia ini mensyaratkan pembangunan karakter bangsa yang kuat. Karakter yang sejalan dengan tujuan-tujuan bersandarkan pada pemahaman atas kondisi obyektif material untuk melampaui keadaan dimana suatu negeri dapat bebas dari terjadinya eksploitasi manusia atas manusia.⁶

Disinilah substansi dari politik marhaenisme yakni dimensi sosio-nasionalisme yang didalamnya tumbuh kebangsaan yang luas dan tidak dilandasi oleh semangat serang menyerang dan fasistik, namun menjadi perangkai bagi pembentukan solidaritas bersama (gotong-royong) dan sosio-demokrasi yakni memajukan demokrasi politik dan ekonomi untuk memperjuangkan kehendak kaum marhaen, menjadi proyeksi politik Sukarno agar karakter yang menyatukan ikatan berbangsa menjadi karakter yang kuat. Karakter bangsa yang sejalan dengan pemajuan kepentingan kaum marhaen. Artinya Marhaenisme bukanlah sebuah dogma tertutup, Marhaenisme adalah senjata ideologis untuk membangunkan kesadaran kelas dan kesadaran kebangsaan diantara kelas-kelas sosial yang lemah dalam rangkaian keindonesiaan untuk menghadapi tantangan-tantangan sejarahnya.

Uraian Sukarno tentang sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme yang tumbuh di masyarakat dan berdasarkan atas hukum dan susunan masyarakat Indonesia untuk membereskan kehidupan sosia ekonomi dan sosial politik rakyat marhaen ini sejalan dengan uraian tentang konsepsi nasionalisme yang berpijak pada analisa historis materialisme dari Otto Bauer. Uraian Sukarno diatas yang berpijak pada sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme yang berjejak pada hukum-hukum sosial dan susunan masyarakat konsisten dengan uraian Otto Bauer yang menegaskan bahwa konsepsi nasionalisme bersandar pada analisa konkret terhadap kondisi konkret yang menyejarah.

Ketika menegaskan bahwa kebangsaan sebagai ikatan yang disatukan dalam persamaan riwayat menuju persamaan karakter, Bauer tidak memahami karakter sebagai suatu istilah psikologis seperti yang dituduhkan oleh kaum Bolshevik seperti Lenin maupun Stalin. Otto Bauer memahami kesatuan karakter dalam kehidupan berbangsa dalam pertimbangan sosiologis, yang didalamnya kompleksitas sosial terhubung dengan pertarungan sosial, interaksi antar subyektif dalam komunitas kebangsaan dan proses sejarah dalam tinjauan ekonomi-politik membentuk corak karakter kebangsaan di tiap-tiap negeri.⁷

Untuk itu patut untuk dipertimbangkan disini kritik Karl Kautsky terhadap konsepsi Bauer tentang kebangsaan terutama simpulannya terkait bangsa sebagai satu kesatuan karakter.

⁵ Baca Sukarno, *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta Pendamar IV 1958). Hal. 7-18.

⁶ Baca Sukarno, *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta Pendamar IV, 1958) Hal. 64-68.

⁷ Baca Otto Bauer, *The Question of Nationalities and Social Democracy* (Minneapolis, University of Minnesota Press, (1907) 2000). Hal. 109-138.

Menurut Kautsky ketika Bauer menegaskan bahwa bangsa terikat dalam satu kesatuan karakter yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain, maka Bauer terjebak dalam generalisasi. Bahwa sesungguhnya budaya dan karakter yang mengikat bangsa tersebut, hakikatnya adalah budaya dan karakter dari kelas sosial maupun kekuatan dominan tertentu yang dipaksakan dan direproduksi melalui otoritas kekuasaan.

Berhubungan dengan konsepsi sosio-nasionalisme Sukarno, maka dalam semesta komunitas kebangsaan sosialisme ala Indonesia yang mencari beresnya kehidupan rakyat Marhaen, maka karakter bangsa tumbuh dan terbentuk sebagai hasil dari partisipasi kolektif bernafaskan pada gotong-royong. Berangkat dari pemahaman seperti ini, maka kita dapat menguraikan mengapa Sukarno tak henti-henti menyerukan jargon Revolusimu belum selesai! Mengingat bahwa dalam tahapan Indonesia merdeka, proses perjuangan yang bercirikan persatuan nasional belum terbangun diatas fondasi susunan masyarakat sosialisme ala Indonesia.

Konsepsi tentang sosio-nasionalisme Sukarno sebagai faham kebangsaan yang berjejak pada hukum-hukum masyarakat dan mempertimbangkan pertarungan sosial yang menyejarah ini dapat menjawab kritik tajam terhadap faham kebangsaan dari perspektif marxisme ortodoks. Baik Leon Trotsky maupun Rosa Luxemburg sebagai pengusung paham marxisme ortodoks memaknai nasionalisme sebagai paham penyambung kepentingan kaum borjuasi. Bagi mereka proyeksi politik nasionalisme alih-alih memperkuat perjuangan anti-imperialisme justru melemahkan perjuangan revolusi sosialis untuk menumbangkan kapitalisme sebagai biang dari proyek politik imperialisme. Dalam pandangan sosio-nasionalisme Sukarno yang terinspirasi dari karya Otto Bauer pemimpin Sosial-Demokrasi asal Austria tuduhan tersebut salah alamat. Untuk menelusuri jawaban sosio-nasionalisme terhadap kritik tersebut, kita bisa kembali pada uraian Sukarno dalam *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme* dimana dia menyatakan bahwa faham materialisme historis mengajarkan soal bagaimana suatu pikiran bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya.

Uraian sederhana ini menegaskan bahwa suatu konsepsi atau faham itu tidak berlaku dalam makna yang tunggal diseluruh tempat, karena bukan pikiran yang menuntun realitas. Sebaliknya adalah proses material berhubungan dengan aktivitas manusia dalam perjumpaannya dalam realitas sosial yang menentukan makna suatu faham disuatu tempat yang berbeda dengan tempat lainnya. Dalam konteks perlawanan anti-imperialisme di Indonesia, perjuangan membangun persatuan nasional bukanlah menjadi agenda kaum borjuasi, dan konsepsi sosio-nasionalisme dalam uraian Sukarno menyadari bahwa rusaknya faham kebangsaan di Eropa terjadi karena pembajakan faham kebangsaan di Eropa oleh kekuatan sosial kaum borjuasi, baik dalam menghancurkan konflik sosial paska revolusi politik seperti di Prancis, maupun dalam pemanfaatan nasionalisme dalam proyek imperialisme ke negeri terjajah maupun dalam perang dunia diantara kekuatan-kekuatan imperialisme.

Kebangsaan sebagai Kehendak Bersama dan Referendum Setiap Hari

Dimensi kedua dari faham sosio-nasionalisme Sukarno yang patut diuraikan adalah pernyataannya dalam Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 yang mengutip Ernest Renan, bahwa bangsa adalah adanya gerombolan manusia yang sepakat dalam kehendak untuk hidup bersama. Konsepsi kebangsaan Renan sebenarnya bersanding dengan pandangan Bauer dari sisi keduanya membangun suatu konsepsi yang lapang dan menolak untuk mengambil kategori-kategori obyektif seperti agama, bahasa maupun asal keturunan sebagai pengikat definisi kebangsaan. Namun demikian seperti diutarakan oleh Sukarno konsepsi lapang tentang kebangsaan dari Ernest Renan ini juga memiliki kelemahan, karena tidak semua komunitas manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu dapat didefinisikan sebagai bangsa. Berbagai macam suku di Indonesia seperti Jawa, Batak, Minang, Sulawesi, Sunda, Bugis dan lain

sebagainya memiliki kehendak kuat untuk bersatu namun mereka tidak dapat difahami sebagai bangsa.⁸

Konsepsi Renan tentang bangsa juga tidak sensitif terhadap kompleksitas sosiologis dalam pemahaman bahwa setiap rangkaian perjumpaan sosial yang berlangsung di masyarakat tidak lepas dari pertarungan sosial yang terhubung dengan kepentingan setiap kekuatan-kekuatan sosial untuk memenuhi kehidupannya dalam proses sejarah. Oleh karena itu seperti diutarakan oleh Sukarno di berbagai kesempatan bahwa beliau lebih menerima konsepsi kebangsaan dari Otto Bauer dalam spektrum aliran sosial-demokrasi dibandingkan dengan faham kebangsaan dari Ernest Renan. Diluar kelemahan Ernest Renan dalam memahami konsepsi kebangsaan tersebut, namun terdapat berbagai ulasannya yang menarik untuk membangun nuansa yang kaya dalam mengelaborasi pandangan tentang bangsa. Dalam kuliah Ernest Renan (1882) berjudul *What is a Nation? (Qu'est-ce qu'une nation)* di Universitas Sorbonne, Prancis bahwa dalam merawat kehendak bersama dalam ikrar berbangsa keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh dua hal yang saling berhubungan satu sama lain yakni tindakan bersama untuk memaknai warisan-warisan budaya masa lalu yang kaya dan kerja untuk membangun kesepakatan setiap hari antara anggota bangsa untuk membangun solidaritas bersama. Oleh karena itu menurut Renan bahwa inisiatif kebangsaan adalah suatu proses plebisit atau referendum setiap hari (*daily plebiscite*) untuk terus meyakinkan kebersamaan setiap orang-orang yang terhimpun dalam satu bangsa.

Dalam pengertian diatas nasionalisme dapat memiliki orientasi progresif dan membantu sebagai minyak pelumas bagi setiap masyarakat dalam suatu negara bangsa untuk mengarungi jalan modernitas dan kemajuan. Dalam bahasa Sukarno melalui ikatan kebangsaan yang kokoh, bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Seperti diutarakan oleh Ernest Gellner sosiolog yang menciptakan magnum opus tentang kebangsaan, faham nasionalisme merupakan dimensi penting bagi setiap nation-state untuk membuka gerbang modernitas dalam menginisiasi proyek-proyek pembangunan modern. Hal ini dalam perspektif historis-sosiologi bekerja terutama dalam fase peralihan misalnya dari era feodalisme menuju era masyarakat industrial awal, ketika masyarakat mengalami fase *social entropy* fase ketika masyarakat berguncang pada saat perubahan, dan secara struktural mengalami berbagai macam ketimpangan sosial, nasionalisme bekerja dalam prosesi menjebol dan membangun dalam mengiringi proses transformasi sosial, saat bangunan struktur lama runtuh dan perekatan sosial baru dibutukan dalam bangunan struktur sosial yang baru.⁹ Bahkan di berbagai negara terutama pada negeri-negeri dunia ketiga, nasionalisme adalah manifestasi terkuat dari semangat modernitas yaitu kehendak untuk menciptakan pemerintahan sendiri (*self-rule*), dalam pembebasan nasional semangat demokratik berperan penting untuk memastikan kehadiran negara-bangsa.

Pada setiap negara-bangsa yang memiliki orientasi kebangsaan yang berkeadaban (*civic-nationalism*), api nasionalisme berperan untuk mendewasakan negara dalam peran-peran kepeduliannya dalam pengelolaan urusan publik. Ketika negara menyongsong tahapan modernitas melalui inisiatif berbagai program progresif seperti penataan negara (*welfare state*), pendidikan untuk semua, program redistribusi kemakmuran, maka nasionalisme dapat berperan sebagai perekat sosial membangun kesadaran berbangsa dari setiap lapisan kelas sosial di masyarakat untuk menggerakannya ditengah berbagai tantangan sosial yang menghadang.¹⁰ Dalam konteks era kontemporer, ketika gelombang kapitalisme neoliberal, dimana arus kapital bergerak tak terbendung oleh benteng politik demokrasi, corak negara liberal yang menempatkan negara sebagai wasit netral tanpa peran-peran pembelaan terhadap

⁸ Baca Sukarno 1958, op.cit. hal. 62-64.

⁹ Baca Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*. (New York, Cornell University Press, 1983) Hal. 63-87.

¹⁰ Ibid.

hajat hidup warganya, absennya semangat nasionalisme justru menampilkan sentiment-sentimen tribalisme politik yang melahirkan populisme kanan di seluruh dunia.

Disinilah kita menemukan relevansi saat Indonesia sedang memasuki tahap revolusi sosial untuk melampaui tatanan masyarakat feodalisme dan warisan penyakit sosial kolonialisme-imperialisme pada tahun 1964 dalam pidato 17 Agustus 1945 berjudul Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP), dia menyerukan Program Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Formulasi strategis untuk memasuki fase transformasi sosial dalam rangka melampaui feodalisme dan warisan kolonialisme tidak hanya didorong oleh inisiatif politik dan ekonomi yang revolusioner, namun juga direkatkan dengan inisiatif strategi kebudayaan dalam rangka membangun budaya berkepribadian dimana kaum marhaen menjadi creator dalam menciptakan kebudayaan nasional yang didalamnya karakter solidaritas memperkuat inisiatif ekonomi-politik tersebut.

Selanjutnya berpijak pada uraian Ernest Renan bahwa nasionalisme adalah plebisit setiap hari untuk merangkai kekayaan asset sejarah dan budaya di masa lalu guna membangun konsensus saat ini. Point ini kerap kali disalahfahami oleh berbagai pihak sebagai upaya terus menerus untuk memanipulasi sejarah masa lalu dengan menampilkan hal-hal yang indah saja untuk membangun kesadaran kebangsaan. Yael Tamir dalam karyanya *Why Nationalism?* menjawab gugatan tersebut. Menurutnya bahwa eksplorasi sejarah dan tradisi budaya sebagai jalan membangun konsensus kebangsaan tidak selalu bersifat manipulatif. Upaya eksplorasi sejarah secara ilmiah dan obyektif dengan mengakui pula kekurangan masa lalu berperan penting dalam pembentukan konsensus kebangsaan saat ini.¹¹ Sebagai contoh Bapak Tiongkok modern Sun Yat-Sen dalam rangkaian pidato kebangsaan yang termashur berjudul *San Min Chu-I* misalnya menggerakkan rasa kebangsaan Tiongkok melalui ilustrasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah membudaya dan menyejarah di masyarakat Tiongkok. Bahkan sampai saat ini narasi kebangsaan Tiongkok dalam hubungannya untuk berkontestasi dalam dunia internasional digerakkan oleh kekalahan mereka oleh bangsa-bangsa Barat dalam Perang Candu (*Opium War*).

Demikian pula dengan cara bagaimana Sukarno membangun semangat kebangsaan dengan memanfaatkan warisan sejarah masa lalu. Seperti ditegaskan oleh Sukarno dalam pamphlet politik *Mencapai Indonesia Merdeka* yang ditulis tahun 1933 saat menyanggah argumen sarjana kolonial Professor Veth yang menyatakan bahwa Nusantara semenjak jaman Hindu Budha telah dijajah oleh bangsa India. Sukarno menyatakan penjajahan terhadap Nusantara baru berlangsung semenjak negeri-negeri Barat melalui proyek imperialismenya datang ke bumi Nusantara. Apa yang terjadi pada masa lalu adalah perjumpaan peradaban dan didalamnya termasuk agama yang menaburkan saling-silang kebudayaan. Para raja dari kerajaan-kerajaan di Nusantara memeluk Hindu dan Budha namun mereka memerintah di negerinya sendiri. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa Nusantara sebelum kedatangan Belanda tidak pernah dijajah, namun rakyatnya kaum Marhaennya tidak pernah hidup merdeka. Mereka selalu berada pada posisi terjajah semenjak dominasi stelsel feodalisme sampai pada fase imperialisme. Uraian diatas menunjukkan bahwa Sukarno berbeda dari mereka yang berpijak pada faham nasionalisme Jawa, dimana masa lalu selalu dilihat sebagai pencerminan kesuburan dan kemakmuran gemah ripah loh jinawi. Masa lalu tidak selamanya indah dan membahagiakan terutama bagi rakyat Marhaen, dan dengan itu maka orientasi kebangsaan progresif dan maju kedepan untuk melampaui masa lalu dan tantangan masa kini dalam perspektif sosialisme ala Indonesia beriringan dengan faham kebangsaan.

Kebangsaan sebagai Perjumpaan Rakyat dan Tanah

¹¹ Baca Yael Tamir, *Why Nationalism?* (New Jersey, Princeton University Press, 2019) Hal. 52-60.

Dimensi ketiga untuk melengkapi dua konsepsi sebelumnya tentang kebangsaan adalah makna kebangsaan secara geopolitik yakni perjumpaan antara rakyat dan tanah. Rakyat sebagai tiap-tiap orang yang berkehendak untuk hidup bersama sebagai bangsa dengan tanah maupun territorial yang melingkupinya. Artinya bahwa dalam konteks geopolitik, maka tiap-tiap bangsa dapat ditentukan secara jelas melalui peta yang mengidentifikasi persatuan antara rakyat dan tanah dalam satu wilayah teritori yang jelas. Bangsa Indonesia dalam pengertian geopolitik menaungi satu wilayah teritori yang jelas dalam peta, begitu pula sebagai ilustrasi seharusnya antara Pakistan dan India adalah satu kesatuan kebangsaan yang dipisahkan dalam satu negara. Suatu penggambaran territorial yang jelas dalam satu kesatuan geografis territorial dalam peta merupakan penanda pasti untuk mendefinisikan negara bangsa. Sukarno sendiri menegaskan dalam perpaduan antara tiga konsep dengan mengikutkan pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer sebelumnya sebagai satu rangkaian konsepsional tentang bangsa. Menurut Sukarno bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang--menurut Renan--memiliki kehendak hidup bersama yang kuat, dan mengambil Otto Bauer keras ia memiliki *Charaktergemeinschaft* (karakter bersama) tetapi yang berdiam dalam satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan.¹²

Melampaui berbagai macam kontroversi terkait teori kebangsaan sebagai perjumpaan antara kumpulan manusia dan tanah air yang dipandang memberikan legitimasi terhadap proyek ekspansionis dan imperialis Indonesia kedepan, penjelasan Sukarno diatas memberi petunjuk bahwa kita harus memahami konsepsi kebangsaan dalam ajarannya dalam kesatuan dari rangkaian tiga konsepsi diatas.

Selanjutnya ketika kebangsaan dimaknai sebagai kesatuan yang diikat oleh kesatuan riwayat atau takdir sejarah menuju satu karakter bangsa seperti dimaksudkan oleh Otto Bauer, jelas akan mengerangking inisiatif ekspansi dari Indonesia yang tumbuh dalam satu riwayat menghadapi imperialisme Belanda untuk melakukan ekspansi misalnya ke negara-negara yang merupakan jajahan dari imperialisme Inggris (Malaysia), Spanyol dan Amerika Serikat (Filipina) maupun Prancis (Vietnam). Sementara revisi konsepsi Haushofer tentang persatuan darah dan teritori tanah air, menjadi persatuan antara rakyat dan tanah air secara geopolitik juga menghilangkan potensi Indonesia misalnya untuk menganeksasi wilayah bekas jajahan Belanda seperti Suriname yang secara geografi sangat jauh dari kesatuan territorial Indonesia.

Apabila demikian lalu apa relevansi dari teori tentang menyatunya rakyat dengan tanah air secara geopolitik dimasukkan dalam rangkaian konsepsi sosio-nasionalisme dalam ajaran Sukarno? Ketika dibaca dalam satu rangkaian kesatuan pengertian maka teori tentang manusia dan tanah air yang menyatu dengan konsepsi Renan dan Bauer memiliki implikasi politik bagi konsepsi wawasan kebangsaan (sosio-nasionalisme) kita:

Pertama, rangkaian wawasan nasionalisme yang diuraikan oleh Sukarno menegaskan nasionalisme dalam pengertian kesatuan pertahanan dan ketahanan negara-bangsa. Dalam kesadaran menyatunya manusia dan territorial kebangsaan yang tidak fasistik dan imperialistik, maka kebangsaan juga harus dimaknai sebagai perlindungan negara terhadap ketahanan hidup manusia, bumi, lautan dan udara sebagai habitat dan ekosistem sosial tempat manusia hidup dan mencari bekal hidup dalam kerangka territorial Indonesia. Konsepsi diatas melegitimasi hadirnya kedaulatan rakyat yang dikelola oleh negara untuk membangun kerangka politik demokrasi yang melindungi kehidupan segenap rakyat Indonesia dari ancaman-ancaman kekuatan eksternal yang mengikis kedaulatan manusia Indonesia misalnya dihadapan ancaman ekspansi kedaulatan pasar diatas politik. Konsepsi kebangsaan menurut Sukarno didalamnya menyangkut kesadaran pertahanan untuk mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia.

¹² Baca Sukarno, Pantja Sila Sebagai Dasar Negara (Jakarta Pendar, 1958) Hal. 69.

Kedua, berangkat dari konsepsi tentang perjumpaan antara manusia dan tanah dalam satu riwayat bersama, maka konsepsi ini terhubung dengan penjelasan Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945, bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas dan disebelah jembatan tersebut kita menyusun masyarakat Indonesia yang gagah, sehat, kuat, kekal dan abadi. Pandangan ini mengandaikan bahwa hanya dengan kemerdekaan sebagai awal pembentukan negara bangsa, maka aktualisasi dari pemenuhan kemanusiaan rakyat Indonesia dapat dimulai. Penjajahan atau imperialisme-kolonialisme membelenggu manusia Indonesia untuk mengaktifkan potensi kemanusiaannya. Dalam belenggu penjajahan, alienasi manusia terhadap potensi kemanusiaannya, beserta kerja yang dilakukan dalam lingkungan sosial baik katas tanah, air dan sumber daya yang dimiliki rakyat Indonesia berlangsung secara total.

Pemahaman bahwa kebangsaan adalah menyatunya manusia yang hendak hidup bersama dengan kapasitas mengelola tanah air yang menyatu dalam hidupnya mengandaikan pemisahan terhadap kondisi obyektif historis rakyat Indonesia dalam alam penjajahan, dimana relasi antara rakyat dan tanah yang dikelolanya baik dalam fase imperialisme purba, imperialisme tanam paksa, imperialisme liberal dan imperialisme etis ditandai oleh corak eksploitasi bagi kepentingan kekuatan dominan imperialisme Belanda dan kombinasinya dengan kekuatan formasi feodalisme yang memiskinkan dan menghisap daya hidup rakyat Indonesia.¹³

Ketiga, pemahaman soal kebangsaan sebagai persatuan antara manusia dan tanah air dapat ditarik secara radikal sebagai premis awal tentang proses penyelenggaraan negara yang mempertimbangkan tiap-tiap manusia Indonesia dalam proses kerja dan interaksinya terhadap lingkungan sosial menyatu satu sama lain. Konsekuensi dari hal ini adalah pada skema pembangunan negara, maka aktivitas ekonomi tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi proses akumulasi kapital yang mengarah pada pembentukan formasi kapitalisme ekstraktif yang menghancurkan kesatuan antara manusia beserta bumi dan kekayaan alam yang menyatu dalam kehidupan sosial manusia.

Seperti yang berkumandang dalam pidato Bung Karno Lahirnya Pancasila bahwa cita-cita gotong-royong dan kehendak untuk bersatu yang menjadi saripati dari Pancasila dan nasionalisme kita ini dipertegas dengan tanpa kehilangan topangan basis materialnya. Bung Karno dalam pidato monumental itu melampaui konsepsi nasionalisme Otto Bauer dan Ernest Renan yang memaknai kebangsaan sebagai kehendak untuk bersatu. Lebih jelasnya Bung Karno menjelaskan: Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft"-nya dan perasaan orangnya, "l'ame et desir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan.

Kesatuan integral antara manusia dan tanah air dalam konsepsi Bung Karno diatas mengandung makna bahwa kebersamaan dan kehendak gotong-royong yang menjadi esensi dari rasionalitas hadirnya Indonesia membutuhkan ruang sosial bersama sebagai *collective life-capital* modal hidup bersama untuk dapat mengembangkan karakter kemanusiaan yang adil dan beradab dalam proyek bernegara Indonesia. Spirit solidaritas, kolektivitas dan kebersamaan yang terangkum dalam konsepsi gotong-royong hanya bisa berjalan ketika otoritas politik negara mampu menjamin bumi, air dan kekayaan alam atau tanah air yang didiami oleh rakyat Indonesia tidak hanya memiliki fungsi privat namun juga melampaui itu juga memiliki peran sosialnya bagi pemenuhan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

¹³ Baca Sukarno, Indonesia Menggugat (Jakarta, Gunung Agung TBK, 2001). Hal. 26-60.

Nasionalisme dalam Tamansari Internasionalisme

Setelah menelusuri rangkaian konseptual tentang kebangsaan yang saling kait-mengait dalam konsepsi tentang sosio-nasionalisme, bagian ini akan mengulas corak horizon atau batas-batas terjauh dari wawasan kebangsaan Sukarno. Seperti diuraikan Sukarno dalam *Lahirnja Pantja-Sila* bahwa Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme, nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak tumbuh dalam tamansarinya internasionalisme. Rangkaian kalimat ini adalah jembatan dari uraian Pancasila Sukarno dari sila kebangsaan menuju sila internasionalisme atau kemanusiaan. Dalam uraiannya tentang keterkaitan antara nasionalisme dan internasionalisme, Sukarno menggandeng pandangan Mahatma Gandhi, "My nationalism is humanity!".

Uraian diatas untuk menegaskan dalam uraian Sila Kebangsaan dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945 bahwa pandangan kebangsaan yang berakar dari sosio-nasionalisme Sukarno menolak cara pandang nasionalisme yang sempit. Sukarno menjelaskan bahwa prinsip kebangsaan ibarat pedang bermata dua mengandung energi progresif sekaligus reaktif, dalam mitologi Jawa dapat merepresentasikan kekuatan yang maju ibarat Semar yang mendampingi Pandawa maupun Togog yang mendampingi Kurawa. Sukarno menegaskan bahaya faham nasionalisme ketika ditarik pada titik ekstrem (peruncingan) pada faham *chauvinism* yang mengarah pada *Indonesia uber alles* (kebangsaan berorientasi fasistik). Seperti diuraikan oleh Sukarno bahwa tanah air kita Indonesia hanya bagian kecil dari dunia, kebangsaan Indonesia harus menuju pada persatuan dunia dan persaudaraan dunia. Selanjutnya Sukarno menegaskan bahwa meskipun beliau menyandingkan nasionalisme dengan internasionalisme, dia menolak faham kosmopolitanisme, faham persatuan warga dunia yang menegasikan peran-peran signifikan dari bangsa didalamnya.

Dipertegas lagi uraian tentang korespondensi antara nasionalisme dan internasionalisme oleh Sukarno dalam Pidato Pembukaan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955 di Bandung, bahwa kita tidak akan bisa menorehkan nilai-nilai martabat kemanusiaan yang sempurna selama masih ada bangsa-bangsa yang belum merdeka. Martabat manusia tertinggi adalah pembebasan manusia dari belenggu ketakutannya, dari belenggu yang menurunkan derajatnya, dari belenggu belenggu kemiskinan, dan pembebasan manusia dari ikatan-ikatan jasmani, rohani dan intelektual yang menghalangi kemajuan mayoritas ummat manusia.¹⁴ Uraian Bung Karno diatas menegaskan bahwa seperti halnya pandangan Gandhi paham kemanusiaan hanya bisa disempurnakan secara konkret ketika kemerdekaan dan pembangunan nasion mencapai fase kemerdekaannya. Hanya dengan itu maka ummat manusia dapat memulai perjalanannya menuju penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Patut pula dipertimbangkan bahwa melampaui uraian-uraian yang benar dan koheren secara filosofis terkait hakekat kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa didalamnya, Sukarno menegaskan keterkaitan antara nasionalisme dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam kerangka uraian analitik ekonomi-politik, uraian yang berbasis susunan masyarakat yang konkret. Sukarno muda pada tahun 1933 dalam pamphlet politiknya Mencapai Indonesia Merdeka menyatakan bahwa corak imperialisme Belanda terhubung dengan imperialisme internasional, maka perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme di Indonesia tidak dapat dijalankan sendirian dan membatasi dirinya pada pandangan nasionalisme saja. Mengutip Albert-Pierre Sarraut politisi radikal Prancis bahwa negeri-negeri koloni harus rukun satu sama lain dan bekerja sama, dan dalam uraian Sukarno jikalau Banteng Indonesia sudah bekerja sama dengan Sphinx dari negeri Mesir, Lembu Nandi India, Barongsai Tiongkok, dan apabila Banteng Indonesia dapat bekerjasama dengan musuh kapitalisme dan

¹⁴ Ibid. hal. 46.

kekuatan internasionalisme diseluruh dunia maka hari-hari internasionalisme-imperialisme segera terbilang.¹⁵

Uraian Sukarno diatas menegaskan bahwa aliansi memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal harus didasari oleh penghapusan penghisapan manusia atas manusia yang memanifes dalam bentuk imperialisme, yang didalamnya meminjam metafora dalam dunia pewayangan Rama berjuang melepaskan ikatan pada tubuhnya untuk dapat mengalahkan Rahwana-Dasamuka. Perjuangan tersebut untuk membangun fondasi kebangsaan yang tidak dibajak oleh kaum borjuasi namun dipimpin oleh kaum Marhaen, dimana perjuangannya harus menjadi satu dengan perjuangan anti-imperialisme dunia.¹⁶ Hanya dengan jalan berpijak pada kerjasama internasional maka perjalanan kebangsaan dapat melepaskan dirinya dari imperialisme dan warisannya neo-imperialisme. Sebaliknya tatanan dunia internasional hanya dapat tumbuh berkembang mengabdikan pada kemanusiaan, diatas tumbuh suburnya pergaulan kebangsaan yang sehat dan memperjuangkan kemerdekaan warganya yang setara.

Kembali pada uraian konsepsi sosio-nasionalisme dari Sukarno secara pertimbangan analisis konkret terhadap kondisi konkret, menempatkan tumbuh nilai-nilai kemanusiaan dalam bumi nasionalisme agar bersemi pada tamansarinya internasionalisme justru lebih masuk akal dan lebih koheren. Watak ekspansif dari sistem tatanan kapitalisme hanya dapat didisiplinkan oleh perlawanan tatanan demokratik yang berpijak pada terbangunnya negara bangsa yang mengabdikan dan diperintah oleh kekuatan yang melindungi kepentingan kaum Marhaen. Dalam penghormatan terhadap pergaulan sosial yang berbasis pada solidaritas ditingkat internal bangsa dan menyebar dalam penghormatan terhadap relasi bangsa-bangsa yang mensubordinasikan dinamikanya pada kemaslahatan ummat manusia, maka kerangka kemanusiaan yang kokoh mampu menemukan fondasi konkretnya.

SIMPULAN

Penafsiran terhadap konsepsi sosio-nasionalisme dari Sukarno dalam tulisan ini menunjukkan bahwa uraian tentang faham kebangsaannya bertolak belakang dari asosiasi atas nasionalisme sebagai gagasan reaksioner yang seirama dengan populisme kanan, neofasisme maupun nasionalisme imperialis. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa pengembangan ajaran sosio-nasionalisme Sukarno dalam terang pemahaman yang berkorespondensi dengan perspektif sosiologis kontemporer dapat menjawab dan melakukan kritik balik terhadap gugatan dari kalangan marxisme klasik, kosmopolitanisme liberal maupun faham liberal individualis terhadapnya. Dalam konteks ini, maka sosio-nasionalisme seharusnya dibaca dalam rangkaian konsepsi yang bertumpu pada ajaran Sukarno yakni nasionalisme sebagai totalitas manusia yang diikat oleh persamaan riwayat dan tumbuh bersama membentuk kesatuan karakter (Otto Bauer) sebagai kehendak untuk hidup bersama (Ernest Renan), serta perjumpaan antara manusia dan tanah airnya. Rangkaian keempat konsepsi yang membentuk pandangan sosio-nasionalisme Sukarno ini hendaknya juga dilihat dalam pemahaman horizon internasionalisme atau internasionalisme yang tumbuh subur dalam buminya nasionalisme serta nasionalisme yang tumbuh subur dalam buminya nasionalisme. Seperti diuraikan dalam artikel ini, sosio-nasionalisme sebagai suatu cara pandang yang berpijak pada susunan masyarakat yang menyejarah berpotensi kuat untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer dalam kancah ekonomi-politik global maupun nasional seperti gelombang amuk populisme kanan, hantaman dari rezime kapitalisme neoliberal, maupun artikulasi politik yang tidak lagi peduli terhadap hajat hidup warganya. Rangkaian persoalan-persoalan dunia dan kebangsaan ini semestinya diletakkan pada pijakan formulasi kebangsaan yang progresif,

¹⁵ Baca Sukarno, Mencapai Indonesia Merdeka dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I (Jakarta, Yayasan Bung Karno, 2014) hal. 304-319.

¹⁶ Ibid.

kebangsaan yang didalamnya mengartikulasikan politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiri dan kebudayaan yang berkepribadian yang kesemuanya mencari beresnya kehidupan rakyat marhaen.

DAFTAR PUSTAKA

- David Bouchier .(2015). Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State (New York, Routledge, 2015).
- David Harvey. (2009). Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom (New York, Columbia University Press, 2009)
- Ernest Gellner.(1983). Nations and Nationalism. (New York, Cornell University Press, 1983).
- Hans Pols. (2019). Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Hans Van Miert. (2003). Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930, Hasta Mitra 2003, Jakarta.
- Harry A Poeze. (2014). Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600 1950, KPG 2014, Jakarta.
- Mahatma Gandhi. (1967). The Mind of Mahatma Gandhi. (Ahmedabad, Navajvan Publishing, 1967).
- Peter N Stearns. (2020). Debating Nationalism: The Evolution of Revolutionary Ideas (London,Bloomsbury, 2020).
- Otto Bauer. (2000). The Question of Nationalities and Social Democracy (Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Sukarno. (1958). Pantja Sila Sebagai Dasar Negara (Jakarta Pendamar IV 1958).
- Sukarno. (2001). Indonesia Menggugat (Jakarta, Gunung Agung TBK, 2001).
- Sukarno. (2014). Mencapai Indonesia Merdeka dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I (Jakarta, Yayasan Bung Karno, 2014).
- Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia: Jakarta.]
- Yael Tamir. (2019). Why Nationalism? (New Jersey, Princeton University Press, 2019).
- VI Lenin, The Awakening of Asia, Pravda No.103, 7 Mei 1913.